

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Azwar, Saifuddin, 2005, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Barkatullah, Abdul Halim, 2010, *Hak – Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung.
- _____, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen : Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung
- Buku Panduan Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Tahun 2017/ 2018, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 1996, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik Buku Ketiga*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gozali, Djoni S. dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.S., Salim, 2006, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Kurniawan, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Tim UB Press, Malang.
- Kohar, A., 1983, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Meliala, A Qirom Syamsudin, 1985, *Pokok-pokok Hiukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Miru, Ahmadi, 2013, *Prinsip – prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindon Persada, Jakarta.
- Nasution, S., 1987, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jemmars, Bandung.
- Nugroho, Susanti Adi, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta.
- Siagian, NHT, 2005, *Hukum Konsumen : Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survai*, LP3ES, Jakarta.

- Soerjono Soekanto, 2002, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Widya Karya, Semarang.
- Sunggono, Bambang, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Tje'aman, Mgs. Edy Putra, 1989, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta.

B. Jurnal / Artikel/ Tesis-Disertasi

- Anggriana, Agung, 2009, "Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Bank Terhadap Pemberian Kredit Dengan Agunan Berupa Tanah (Studi Kasus Bank X)", *Skripsi*, Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jawa Barat.
- Mutiana, Nadia Ari, 2018, "*Legal Analysis on Loss Credit Dispute in Regards to Its Dispute Settlement Conducted by Consumer Dispute Settlement Body (BPSK) Towards The Dispute Between BRI Agroniaga Branch Office Rantau Prapat and The Debtor (Case Study: BPSK Decision No. 116/P3K/JS-III/BPSKBB/2016)*", *Skripsi*, Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Permata, Hertina Dinda, 2017, "Kedudukan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Majelis Pengawas Menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016", *Tesis*, Magister, Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Sunarno, "Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Fidusia (Analisis Putusan MA Nomor 589 K/Pdt.Sus/2012)", *Jurnal Penelitian*, Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, 2017.
- Wicaksono, Norman, "Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta dalam Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah",

Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan
Perlindungan Konsumen Seri Kelembagaan.*

Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001
Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga
Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris, Lembaran Negara
Nomor 180 Tahun 2016.

Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang
Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Nomor
182 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790.

Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.

Undang – Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang No.
30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5491.

D. Internet

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan”,
<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/a7c7ba0b3932664c4a49c6b3f10bcf53>, diakses pada tanggal 25 Januari 2018

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, “Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa”, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx>, diakses pada tanggal 16 Maret 2018.

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia, “Profil Latar Belakang”, http://lapspi.org/profile#_visi, diakses pada tanggal 25 Januari 2018.

Otoritas Jasa Keuangan, “Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa”, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx>, diakses pada tanggal 25 Januari 2018.

E. Wawancara

Anggota BPSK Kabupaten Batu Bara Ronwi Apgar Harahap, tanggal 19 Mei 2018, pukul 10:00 WIB, Batu Bara.

Branch Manager PT. Bank Sumut KCP Kebun Kopi Edison Elfin Aritonang, tanggal 03 Mei 2018, pukul 12.00 WIB, Batu Bara.

Notaris/Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Nasip Tampubolon, tanggal 21 Mei 2018, pukul 14:00 WIB, Asahan.

Wakil Ketua BPSK Kabupaten Batu Bara Ahmad Suhaimi, tanggal 16 Mei 2018, pukul 16:00 WIB, Tebing Tinggi.